

Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang

Sri Jayanti¹, Henny Andriyani Wirananda^{2*}

^{1,2*} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Email: srijayanti000@gmail.com¹, hennyandriyani@umnaw.ac.id^{2*}

Abstrak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang, dan untuk menganalisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2022 dalam bulanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang, Denda Pajak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai hubungan yang kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 0.814, atau Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu sebesar 81,4% sedangkan sisanya sebesar 18,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat didalam penelitian ini.

Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor; Denda Pajak; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pendapatan Asli Daerah.

Abstract. The purpose of this study was to determine the effect of Motor Vehicle Tax, Tax Fines and Motor Vehicle Transfer Fees on the Original Regional Income of Deli Serdang Regency, and to analyze the effect of Motor Vehicle Tax, Tax Fines and Motor Vehicle Transfer Fees together on the Original Regional Income of Deli Serdang Regency in 2019-2022 in monthly. The data collection technique used in this study was a documentation study. This study used multiple linear regression analysis methods. The results of the study showed that Motor Vehicle Tax had an effect on the Original Regional Income of Deli Serdang Regency, Tax Fines had a significant effect on the original regional income of Deli Serdang Regency and Motor Vehicle Transfer Fees had no effect on the Original Regional Income of Deli Serdang Regency. Motor Vehicle Tax, Tax Fines and Motor Vehicle Transfer Fees together had an effect on the Original Regional Income of Deli Serdang Regency. Motor Vehicle Tax, Tax Fines and Motor Vehicle Transfer Fees have a strong relationship to Regional Original Income, which is 0.814, or Motor Vehicle Tax, Tax Fines and Motor Vehicle Transfer Fees to Regional Original Income of Deli Serdang Regency, which is 81.4% while the remaining 18.6% is influenced by other factors not included in this study.

Keywords: Motor Vehicle Tax; Tax Fines; Motor Vehicle Transfer Fees; Regional Original Income.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Fenomena ini berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama pemerintah daerah. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor, yang meliputi kendaraan roda dua atau lebih, termasuk alat berat dan alat besar yang bergerak di jalan darat (Januarti & Simarmata, 2018). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh melalui sumber-sumber lokal, termasuk pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), menjadi salah satu komponen utama PAD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif pajak kendaraan bermotor telah ditingkatkan hingga batas maksimum 20%, sementara cakupan objek pajak diperluas hingga mencakup kendaraan milik pemerintah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi pajak kendaraan bermotor (Ferdiansyah, 2020).

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah pengguna kendaraan bermotor setiap tahun menyebabkan bertambahnya kewajiban pembayaran pajak oleh masyarakat. Selain itu, aktivitas jual beli kendaraan bermotor yang terus berkembang turut mendorong penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Untuk mempermudah proses pembayaran pajak, pemerintah menyediakan layanan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang merupakan kolaborasi tiga instansi dengan

fungsi berbeda namun memiliki objek data yang sama, yaitu kendaraan bermotor. Besar kecilnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di suatu daerah menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan pajak daerah. Meskipun memiliki potensi besar, optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh Lasnawati *et al.* (2023) menunjukkan bahwa penerimaan denda pajak kendaraan bermotor selama periode 2013-2017 cenderung menurun, meskipun terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Kontribusi denda pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata hanya sebesar 0,74%, sementara kontribusi pajak progresif sebesar 0,20%. Hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan denda pajak belum signifikan dalam meningkatkan PAD. Selain itu, perbedaan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan akibat variasi wilayah dan periode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih terukur dan relevan, sehingga dapat mendukung pengelolaan pajak daerah secara optimal.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan informasi statistika. Pendekatan kuantitatif merupakan suatu pendekatan didalam penelitian untuk menguji hipotesis dengan menggunakan uji data statistic yang akurat (Jaya, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan mengukur pengaruh pajak kendaraan bermotor, denda pajak, bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang terdiri atas pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang dalam bentuk laporan realisasi anggaran Kabupaten Deli Serdang dan laporan hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan denda pajak selama 4 tahun terakhir periode 2019-2022. Metode

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel dengan menggunakan *sampling jenuh*. *Sampling jenuh* adalah sampel yang mewakili seluruh jumlah populasi. Teknik pengambilan sampel ini digunakan apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. Hal ini sering terjadi ketika populasi umum dijadikan sampel (Sugiono, 2018). Besar sampel penelitian ini adalah 48 laporan bulanan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, sedangkan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan model persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X_1 = Pajak Kendaraan Bermotor

X_2 = Denda Pajak

X_3 = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

a = Konstanta

b_1 = Koefisien regresi variable pajak kendaraan bermotor

b_2 = Koefisien regresi variabel denda pajak

b_3 = Koefisien regresi variabel bea balik nama kendaraan bermotor

e = *Error of term* (variabel yang tidak diteliti)

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) menunjukkan nilai t sebesar 2,708, yang lebih besar dari nilai t tabel (1,680), dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian, peningkatan penerimaan

Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi langsung terhadap kenaikan PAD. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang pesat di Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu faktor utama meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Setiap tahun, pemilik kendaraan bermotor diwajibkan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang pada akhirnya menjadi salah satu sumber utama penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, semakin banyak kendaraan bermotor yang terdaftar, semakin besar pula penerimaan PKB yang berkontribusi pada realisasi PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Deli Serdang diikuti oleh peningkatan penerimaan PKB, yang secara langsung berdampak pada peningkatan PAD.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Siahaan (2017), yang menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Pajak daerah, termasuk PKB, memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menggali sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah sesuai asas desentralisasi. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Ningsih & Rahmayati (2022), yang menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian Permana (2022), yang menyimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Denda Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel Denda Pajak (X_2) memiliki nilai t sebesar 5,574, yang lebih besar dari nilai t tabel (1,680), dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Denda

Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. Penerapan sanksi pajak yang efektif terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan yang tinggi ini berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak daerah, yang pada akhirnya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini konsisten dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan agar ketentuan perundang-undangan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi ini berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan penerapan sanksi yang baik, pemerintah daerah dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Siamena *et al.* (2023), yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Indria Sari Siregar (2023), yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (X3) memiliki nilai *t* hitung sebesar -1,907, yang lebih kecil dari nilai *t* tabel (1,680), dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. Temuan ini mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk di Kabupaten Deli Serdang yang belum melakukan proses balik nama kendaraan bermotor yang dimiliki, sehingga pajak yang dibayarkan tidak masuk ke kas daerah tempat tinggal mereka. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat atau minimnya sosialisasi terkait pentingnya balik nama kendaraan bermotor. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah strategis, seperti

ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak mencakup perluasan objek pajak, misalnya pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan dinas berplat merah. Sementara itu, intensifikasi pajak dapat dilakukan melalui pengembangan sistem pembayaran pajak, seperti razia kendaraan secara berkala, penerapan sistem Samsat online, dan pengadaan Samsat keliling untuk mempermudah akses masyarakat dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Samudera (2016), yang menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk mendukung pembangunan daerah. Untuk meningkatkan efektivitas pemungutan BBNKB, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur ketentuan pemungutannya secara rinci. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Ningsih & Rahmayati (2022), yang menyimpulkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian Hanifah *et al.* (2023), yang menemukan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan hasil penelitian, uji simultan menunjukkan bahwa nilai *F* hitung sebesar 13,707 lebih besar dibandingkan dengan nilai *F* tabel (2,82), dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yang mencakup kendaraan beroda yang digunakan di jalan darat, termasuk alat berat dan alat besar

yang menggunakan roda serta motor. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, penerapan sanksi pajak menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak atau keadaan tertentu, seperti jual beli, hibah, atau warisan.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Mardiasmo (2018), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan retribusi daerah memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Nisa (2022), yang menyimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Denda Pajak secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh masing-masing variabel independen terhadap PAD dapat bervariasi tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan yang diterapkan di masing-masing daerah.

Pembahasan

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sesuai dengan pendapat Agustini *et al.* (2022), yang menyatakan bahwa PKB merupakan salah satu sumber utama pajak daerah yang potensial karena tingginya jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah setiap tahun. Aji *et al.* (2018) juga menekankan bahwa PKB memberikan kontribusi besar terhadap PAD di daerah yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Namun, efektivitas penerimaan PKB sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Hutagaol *et al.* (2023) menekankan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus yang baik menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan

masyarakat. Di Kabupaten Deli Serdang, implementasi Samsat online dan Samsat keliling dapat menjadi langkah strategis untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sebagaimana disarankan oleh Basuki (2017). Penelitian ini juga konsisten dengan temuan Reinhard Valen Ipu (2022), yang menunjukkan bahwa PKB berkontribusi signifikan terhadap PAD di Kabupaten Kepulauan Talaud. Namun, perbedaan tingkat kontribusi di setiap daerah dapat disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar, dan efektivitas pengelolaan pajak. Denda pajak juga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Lasnawati *et al.* (2023) menjelaskan bahwa denda pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Selain itu, denda pajak juga menjadi sumber pendapatan tambahan bagi daerah. Namun, penerapan denda pajak harus dilakukan secara adil dan transparan. Siahaan (2017) menyebutkan bahwa kebijakan perpajakan yang tidak konsisten dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, selain menerapkan denda, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran pajak tepat waktu untuk mencegah pelanggaran.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Siamena *et al.* (2023), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Indria Sari Siregar (2023), yang menyebutkan bahwa denda pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh tingkat kesadaran wajib pajak dan efektivitas penerapan sanksi di masing-masing daerah. Berbeda dengan PKB dan denda pajak, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor. Alawiyah *et al.* (2019) menjelaskan bahwa masyarakat seringkali enggan melakukan balik nama kendaraan karena

biaya administrasi yang dianggap tinggi dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya balik nama kendaraan. Agustini *et al.* (2022) juga menyebutkan bahwa BBNKB memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD jika dikelola dengan baik. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah ekstensifikasi pajak dengan memperluas objek pajak, seperti mengenakan BBNKB pada kendaraan dinas berplat merah. Intensifikasi pajak juga dapat dilakukan melalui razia kendaraan bermotor secara berkala untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi telah melakukan balik nama sesuai dengan ketentuan. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Ningsih & Rahmayati (2022), yang menyatakan bahwa BBNKB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian Hanifah *et al.* (2023), yang menemukan bahwa BBNKB memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola BBNKB dan tingkat kesadaran masyarakat di masing-masing daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut saling melengkapi dalam memberikan kontribusi terhadap PAD. Sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2018), PAD merupakan salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah, sehingga optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi sangat penting. PKB memberikan kontribusi utama karena sifatnya yang rutin dan wajib dibayarkan setiap tahun.

Denda pajak berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sementara BBNKB, meskipun kontribusinya kecil, tetap memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Aji *et al.* (2018) menyebutkan bahwa sinergi antara ketiga variabel ini dapat memaksimalkan penerimaan PAD, terutama di daerah yang memiliki jumlah kendaraan bermotor yang tinggi. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Nisa (2022), yang menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan

Denda Pajak secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Namun, efektivitas pengelolaan pajak daerah sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan tingkat kesadaran masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Denda Pajak, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji parsial dengan nilai thitung sebesar $2,708 > 1,680$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Peningkatan penerimaan PKB, yang didorong oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Deli Serdang, memberikan kontribusi besar terhadap realisasi PAD. Setiap tahun, pemilik kendaraan wajib membayar PKB, sehingga semakin banyak kendaraan bermotor yang terdaftar, semakin besar pula penerimaan PKB yang berkontribusi pada PAD.

Denda Pajak juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sebagaimana dibuktikan oleh nilai thitung sebesar $5,574 > 1,680$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Penerapan sanksi pajak yang baik terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak berkontribusi pada peningkatan PAD, mengingat pajak daerah merupakan salah satu komponen utama PAD. Berbeda dengan PKB dan Denda Pajak, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji parsial dengan nilai thitung sebesar $-1,907 < 1,680$ dan taraf signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Banyak penduduk di Kabupaten Deli Serdang yang belum melakukan balik nama atas kendaraan bermotor mereka, sehingga pajak yang dibayarkan tidak masuk ke kas daerah terkait. Untuk meningkatkan penerimaan

BBNKB, diperlukan langkah ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperluas objek pajak. Hasil uji menunjukkan bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara bersama-sama memengaruhi PAD Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dibuktikan oleh nilai Fhitung sebesar $13,707 > F_{tabel} 2,82$, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Pajak Kendaraan Bermotor menjadi komponen utama yang berkontribusi terhadap PAD, sementara Denda Pajak berfungsi sebagai pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun kontribusi BBNKB lebih rendah, potensinya tetap besar jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan ketiga variabel ini sangat penting untuk meningkatkan PAD Kabupaten Deli Serdang.

Terdapat beberapa saran untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang. Pertama, pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan PAD dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, seperti menciptakan inovasi baru dalam pembayaran PKB. Langkah ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi piutang pajak kendaraan bermotor.

Kedua, SAMSAT Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai instansi pemungut pajak daerah diharapkan dapat mempertegas penerapan sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan, pada akhirnya, meningkatkan PAD. Ketiga, SAMSAT juga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak guna mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Terakhir, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menambah variabel penelitian dan memperluas jangkauan sampel, sehingga hasil penelitian tidak hanya terbatas pada Kabupaten Deli Serdang tetapi juga mencakup wilayah lainnya.

Daftar Pustaka

- Agustini, S., Indradi, D., Darma, S. S., & Irawati, W. (2022). Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) lebih dalam. *Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN)*.
- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Susila, G. P. A. J. (2018). Analisis sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 95-104.
- Alawiyah, T., Yulianto, A., Kharisma, A. S., & Ernitawati, Y. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan di Kabupaten Brebes Tahun 2008-2017 (Studi Empiris pada BPPKAD Kabupaten Brebes). *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 1(1), 71-80.
- Anggraini, M., Arisman, A., & Yunita, C. (2015). *Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan*. Eprint STMIK GI MDP.
- Basuki, Y. R. (2017). *AZ Perpajakan: Mengenal Perpajakan*. Yoyok Rahayu Basuki.
- Darma, K., & Saputra, K. A. K. (2021). Analysis of the potential of motor vehicle taxes and the level of risk during the COVID-19 pandemic to increase regional income in Bali Province. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(7), 872-882.
- Ervina, E., & Hidayah, N. (2024). The Influence Of Local Taxes And Local Retributions On Regional Expenditure Through Local Own-Source Revenue As A Mediating Variable During The Pandemic Period (Empirical Study In Cities/Districts In West Java). *Devotion: Journal of Research and Community*

- Service*, 5(2), 303-317.
<https://doi.org/10.59188/devotion.v5i2.690>.
- Ferdiansyah, F. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 140-154.
<https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7671>.
- Firdaus, M. M. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif; dilengkapi analisis regresi IBM SPSS Statistics Version 26.0*. CV. Dotplus Publisher.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23.
- Hanifah, N., Nurmilah, R., & Tanjung, H. (2023). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (PPPDW) Kota Sukabumi.
<https://doi.org/10.31253/aktek.v15i2.2247>.
- Hutagaol, K. U., Siahaan, S. B., & Ginting, M. C. (2023). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOBA. *Jurnal Skripsi Akuntansi*, 1(1), 88-95.
<https://doi.org/10.46880/siakun.V1N1.H88-95>.
- Ida Zuraida, S. H. (2022). *Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah*. Sinar Grafika.
- Ipu, R. V., Karamoy, H., & Kindangen, W. D. (2022). Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten kepulauan Talaud. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 827-836.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Lasnawati, I., Arifin, W., & Hasanah, A. N. (2023). Analisis Pemungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. "*LAWSUIT Jurnal Perpajakan*", 2(2), 137-147.
<https://doi.org/10.30656/lawsuit.v2i2.1402>.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN—Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Marpaung, I. R., & Lubis, F. A. (2022). Pengaruh iklan, sistem cod, dan promo gratis ongkir terhadap keputusan pembelian pada tiktokshop (studi kasus pada mahasiswa uin sumatera utara). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 9(3), 1477-1491.
- Ningsih, S. W., & Rahmayati, A. (2018). Pengaruh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi jawa tengah. Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2018.
- NISA, M. (2024). *ANALISIS PENGARUH PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIKNAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PEMUNGUTAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE PADA TAHUN 2018-2022* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH).

- Panjaitan, N. J., & Simarmata, H. M. P. (2018). Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan pajak daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK dan BI)*, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v1i1.39>.
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan administrasi perpajakan daerah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode riset penelitian kuantitatif penelitian di bidang manajemen, teknik, pendidikan dan eksperimen*. Deepublish.
- Rumaizha, R., & Pertiwi, G. B. (2024). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)*, 10(1), 125-133.
- Samudra, A. A. (1995). Perpajakan di Indonesia: keuangan, pajak dan retribusi daerah. (*No Title*).
- Sari, C. Y. P., Priono, H., & Widayantie, T. D. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Kinerja dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Mebis*, 5(1), 24-30.
- Setiawan, D. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2019. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(3).
- Siahaan, M. P. (2005). Pajak daerah dan retribusi daerah.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2). <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367>. 2017.
- Siregar, I. S. (2023). Analisis Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Samsat Medan Selatan.
- Sutedi, A. (2022). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.
- Thian, A. (2022). *Perpajakan 1*. Penerbit Andi.
- Utami, W. S. (2024). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15-22. <https://doi.org/10.29313/jra.v4i1.3799>.